

**PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK  
DAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**  
*Wildan Ubaidillah*  
**Nim : 31402300214**

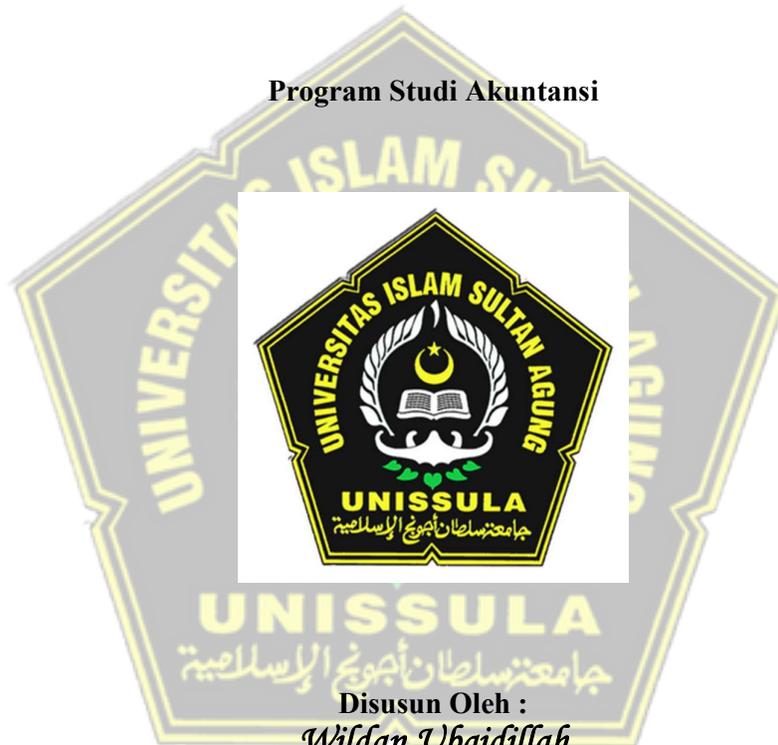
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2025**

**PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK  
DAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

*Wildan Ubaidillah*

**Nim : 31402300214**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

### Skripsi

# PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

HALAMAN PENGESAHAN

Disusun Oleh :

*Wildan Ubaidillah*

Nim : 31402300214

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Maya Indriastuti, S.E.,M.Si.,Ak.CA.,CSRS.,CSRA .,CSP  
NIK. 211406021

**PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK  
DAN ANGGARAN PROGRAM PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Disusun Oleh :

***Wildan Ubaidillah***

**NIM : 31402300214**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 26 Mei 2025

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing,



Dr. Maya Indriastuti, S.E., M.Si., Ak.,  
CA., CSRS., CSRA., CSP  
NIK 211406021

Penguji,



Prof. Dr. Hj. Indri Kartika., S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIK 21149002



Rustan Hanafi, SE, MSc, Akt, CA  
NIK 211403011

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Tanggal 26 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., PhD  
NIK 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wildan Ubaidillah  
NIM : 31402300214  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

**“Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Wildan Ubaidillah

NIM. 31402200136

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Provita Wijayanti, SE., M.Si., PhD., Ak., CA., IFP., AWP, Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Maya Indriastuti, S.E.,M.Si.,Ak.CA.,CSRS.,CSRA .,CSP, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.

5. Kepada Bapak Moch. Achsin (Alm) dan Ibu Rofiqoh selaku orangtua saya serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Aulia Rahma Abida beserta keluarga yang selalu memberikan semangat, waktu, dukungan, bantuan dan do'a selama ini.
7. Terimakasih untuk teman-teman RPL Bojonegoro yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Mei 2025

Penulis,



Wildan Ubaidillah

NIM. 31402300214

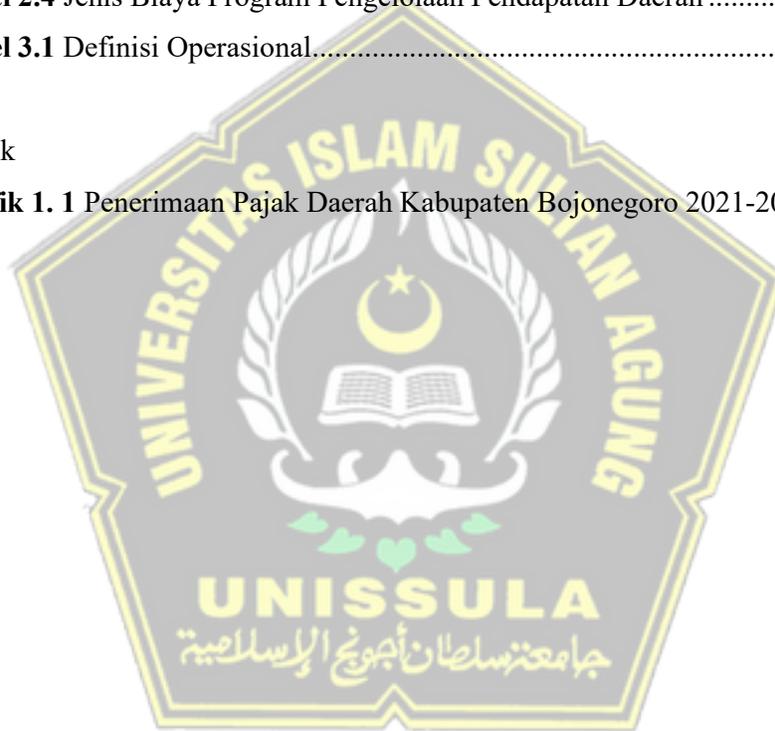
## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Pertanyaan .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.5.1Manfaat Teoritis .....	6
1.5.2Manfaat Praktis .....	6
BAB I    KAJIAN PUSTAKA .....	8
2.1 Grand Teori .....	8
2.1.1 <i>Resource-Based Theory (RBT)</i> .....	8
2.1.2 Manajemen .....	9
2.2 Variabel Penelitian .....	11
2.3 Penelitian Relevan.....	17
2.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis .....	19
2.4.1Kerangka Teoritis.....	19
2.4.1.1 Efektivitas Pajak berpengaruh positif terhadap PAD .....	19
2.4.1.2 Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap PAD.....	21
2.4.2Kerangka Penelitian .....	25
BAB II    METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27

3.2	Populasi dan Sampel Penelitian .....	28
3.2.1	Populasi .....	28
3.2.2	Sampel .....	28
3.3	Sumber dan Jenis Data .....	29
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	29
3.5	Definisi Operasional.....	30
3.6	Teknik Analisis Data.....	31
3.6.1	Analisis Deskriptif.....	31
3.6.2	Uji Asumsi Klasik .....	32
3.6.3	Uji Regresi Linier Berganda.....	35
3.6.3.1	Uji Kelayakan Model .....	35
3.6.3.2	Uji Hipotesis.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		39
4.1	Gambaran Umum Penelitian .....	39
4.2	Hasil Uji Data.....	39
4.2.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	39
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	42
4.2.3	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	47
4.2.3.1	Hasil Uji Kelayakan Model.....	49
4.2.3.2	Hasil Uji Hipotesis.....	52
4.3	Hasil Analisis Data.....	54
4.3.1	Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	54
4.3.2	Pengaruh Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	55
BAB V PENUTUP .....		57
4.1	Kesimpulan .....	57
4.2	Implikasi.....	58
4.3	Keterbatasan Penelitian.....	58
4.4	Agenda Penelitian Mendatang .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....		60

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
<b>Tabel 2.1</b> Rasio Efektivitas .....	13
<b>Tabel 2.2</b> Kegiatan Sub-Kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah .....	16
<b>Tabel 2.3</b> Penelitian Terdahulu .....	17
<b>Tabel 2.4</b> Jenis Biaya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah .....	24
<b>Tabel 3.1</b> Definisi Operasional.....	30
Grafik	Halaman
<b>Grafik 1. 1</b> Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro 2021-2023 .....	2



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
<b>Gambar 2. 1</b> : Kerangka Penelitian Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	26



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak Daerah adalah jenis pajak yang pengelolaannya berada di tangan pemerintah daerah, sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Pengaturan mengenai hal ini tertuang UU No.1 Th 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar hukum dalam mengatur sistem perpajakan di tingkat lokal.. Pengelolaan pendapatan daerah merupakan salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah serta memastikan terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk membiayai berbagai program pembangunan dan menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi warganya.

Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki peran sentral dalam mengelola pendapatan daerah dan merancang program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Badan Pendapatan bertanggung jawab mendukung Bupati dalam menjalankan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991)Dimana Masyarakat selaku *principal* mengamanahkan wewenangnya untuk mengelola pendapatan daerah kepada pemerintah daerah khususnya Bapenda

selaku *steward*. Bapenda sendiri memiliki tanggung jawab untuk mencapai target pendapatan daerah yang diamanahkan oleh Bupati yang nantinya digunakan untuk mendanai program pemerintahan untuk mensejahterakan Masyarakat.

Sumber utama penerimaan keuangan daerah terdiri dari tiga pilar penting, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana yang berasal dari pusat, serta berbagai jenis penghasilan lain yang diakui secara legal. Ketiga unsur inilah yang membentuk tulang punggung keuangan daerah. Bapenda Bojonegoro memiliki andil terbesar dalam pengelolaan PAD khususnya Pajak Daerah Dimana Bapenda berperan sebagai pemungut pajak. Dalam pengelolaan PAD selain pajak daerah Bapenda berperan sebagai koordinator dan tanggung jawab pengelolaan teknis pendapatan daerah berada di tangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan.

*Grafik 1. 1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro 2021-2023*



**Sumber :** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, 2024

Merujuk pada Grafik 1.1, terlihat bahwa sepanjang periode 2021 hingga 2023, capaian realisasi pajak daerah secara konsisten melampaui sasaran yang telah dirumuskan oleh PEMDA sebagai acuan pencapaian kinerja. Hal ini menandakan bahwa pemungutan pajak daerah sudah dilaksanakan secara sangat efektif. Selain Tingkat efektifitas grafik tersebut juga memberikan informasi bahwa Pajak Daerah selama 2021-2023 terus mengalami peningkatan dengan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 15,76%.

Syahril efendi dalam penelitiannya (2021) menyatakan bahwa Efektifitas pajak khususnya Penerimaan dari pajak parkir terbukti memberikan kontribusi yang berarti dan berdampak positif terkait kontribusinya terhadap optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, fakta ini tidak sejalan dengan studi oleh Rina dan Khozin (2020), yang menyatakan Efektivitas pajak daerah, bila dianalisis secara parsial, tidak memberikan kontribusi yang signifikan maupun berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan inilah yang memicu ketertarikan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai keterkaitan antara efektivitas pemungutan pajak dan kontribusinya terhadap PAD. Dalam mengelola organisasi dibutuhkan Salah satu dari berbagai sumber daya yang penting adalah tenaga manusia, uang atau anggaran, material atau bahan dan perlengkapan, mesin atau teknologi, metode kerja, dan pasar atau kondisi Masyarakat (George, 1992). Berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah dirumuskan secara sistematis melalui program khusus, Mengacu pada regulasi yang tercantum dalam KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021. Regulasi ini memuat rangkaian dari proses Tahapan

peninjauan, pengujian keabsahan, dan perbaikan terhadap struktur klasifikasi, kode sistem, dan nomenklatur yang digunakan dalam penyusunan strategi pengembangan wilayah serta pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Program pengelolaan pendapatan daerah yang dibuat secara annual mengatur tentang total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan yang memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola pendapatan daerah, kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mengelola pendapatan daerah, target yang ingin dicapai dari pelaksanaan program, serta rincian belanja yang dibutuhkan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kajian ini menitikberatkan pada hubungan yang ditimbulkan oleh Efektivitas pajak dan anggaran program pengelolaan pendapatan daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro. Dengan memilih Kabupaten Bojonegoro sebagai studi kasus, kajian ini akan menghadirkan pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme efektivitas pemungutan pajak dan alokasi anggaran untuk program pengelolaan pendapatan daerah dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah di tingkat lokal.

Melalui penelitian ini, diharapkan muncul temuan-temuan penting yang dapat dijadikan landasan strategis bagi para pengambil kebijakan di Bapenda Kabupaten Bojonegoro dalam mengoptimalkan efektivitas program pengelolaan pendapatan daerah. Tak hanya itu, Studi ini memberikan peluang untuk memperkuat teori sekaligus praktik pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi rujukan bermanfaat bagi peneliti maupun praktisi yang fokus dalam bidang tersebut.

Bermula dari penjelasan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan kajian mengenai pengaruh efektivitas pemungutan pajak serta program pengelolaan pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kab. Bojonegoro. Temuan kajian yang akan dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Tingginya kontribusi Pajak Daerah dalam PAD yang memiliki rata rata sebesar 17,92% pada 3 tahun terakhir dan terus mengalami kenaikan dengan rata rata 13,20% menandakan bahwa pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara baik. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh antara efektifitas pemungutan pajak dan anggaran program pengelolaan pendapatan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?

### **1.3 Pertanyaan**

1. Apakah efektivitas pemungutan pajak berkontribusi secara positif dan bermakna terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah anggaran yang dialokasikan untuk program pengelolaan Pajak daerah menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Menguji Dampak Efektivitas Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Menguji Dampak anggaran program pengelolaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pengaruh efektivitas pajak dan program pengelolaan pendapatan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji aspek-aspek terkait pengelolaan keuangan daerah dan perpajakan..

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Bagi praktisi, hasil penelitian ini dimaksudkan dapat mengetahui hubungan antara pengaruh efektivitas pajak dan Program pengelolaan pendapatan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bahan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar pemerintah daerah khususnya Bapenda untuk bisa mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.



# BAB I

## KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Grand Teori

#### 2.1.1 *Resource-Based Theory (RBT)*

RBT kali pertama diperkenalkan oleh Penrose pada tahun 1959. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah organisasi terdiri dari berbagai aset yang dapat digunakan secara optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi sekaligus meningkatkan performa baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang (Lubis, 2023). Sumber daya yang dimaksud bisa dalam bentuk fisik maupun non fisik. Ketersediaan dari sumber daya yang potensial akan memberikan keunikan dalam suatu organisasi. Alhasil dengan adanya sumber daya yang memadai atau unik akan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi atau keuntungan (Elya Dasuki, 2021).

Resource-Based Theory dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sumber daya milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan PAD. Sumber daya yang dimaksud adalah Pajak Daerah dan anggaran program pengelolaan pendapatan daerah. Dalam hal ini, PEMKAB Bojonegoro wajib mengatur dan mengoptimalkan penerimaan pajak secara maksimal dan anggaran yang dibutuhkan untuk mengelola pendapatan daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan PAD.

### 2.1.2 Manajemen

#### Tujuan Manajemen

Manajemen merupakan kombinasi antara ilmu dan seni yang mencakup Serangkaian langkah mulai dari merancang, mengorganisasi, memimpin, hingga mengendalikan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan secara optimal. Menurut Siswanto (2005), tujuan manajemen adalah hasil yang ingin dicapai, yang memberikan arah jelas bagi upaya seorang manajer. Selain itu, manajemen juga berfungsi untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia guna Mewujudkan hasil sesuai dengan tujuan yang disepakati.

#### Unsur Manajemen

Sebuah komponen fundamental yang menjadi landasan dalam penyusunan struktur kerja organisasi. Unsur ini mencakup elemen-elemen utama yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas serta sumber daya dalam suatu instansi disebut unsur manajemen.

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* menjelaskan bahwa unsur-unsur manajemen meliputi enam elemen utama yang dikenal dengan istilah “6 M”, yaitu:

1. Man, yakni karyawan dan pengambil keputusan dalam organisasi.

Manusia adalah mereka yang melaksanakan tugas-tugas, mengambil keputusan, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Manajemen manusia melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan, motivasi, pengembangan karir, dan manajemen kinerja.

2. **Materials**, yakni bahan atau barang yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Material adalah bahan mentah atau barang jadi yang diperlukan untuk produksi atau penyediaan layanan. Manajemen material meliputi perencanaan persediaan, pembelian, pengelolaan persediaan, dan distribusi material agar terpenuhi kebutuhan produksi atau layanan.

3. **Machines**, yakni peralatan dan teknologi yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional.

Mesin sebagai unsur manajemen adalah peralatan, teknologi, dan sarana fisik lainnya yang digunakan dalam proses produksi atau operasional. Manajemen mesin melibatkan pemeliharaan, penggunaan efisien, peningkatan teknologi, dan aspek-aspek teknis lainnya untuk mendukung proses operasional yang lancar.

4. **Methods**, yakni rangkaian prosedur strategis yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

Metode adalah prosedur, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Meliputi perancangan dan peningkatan proses kerja, efisiensi operasional, standarisasi prosedur, dan penerapan praktik terbaik.

5. **Money**, yakni aset finansial yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional.

Kuangan merupakan elemen vital dalam manajemen. Meliputi alokasi dan penggunaan dana untuk operasional, investasi, pengembangan, pemasaran, dan kegiatan lainnya. Manajemen keuangan terdiri dari perencanaan anggaran,

pengendalian biaya, analisis investasi, pengelolaan arus kas, dan aspek-aspek keuangan lainnya.

6. Markets, yakni meliputi faktor-faktor lingkungan luar dan pasar di mana organisasi menjalankan operasinya.

Pasar adalah lingkungan eksternal operasional bisnis. Meliputi adanya persaingan, pelanggan, tren pasar, regulasi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi kinerja bisnis. Manajemen pasar melibatkan analisis pasar, segmentasi pelanggan, pengembangan produk, pemasaran, dan respons terhadap perubahan pasar.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perolehan yang berasal dari pemerintah daerah (PEMDA) melalui pemungutan, diatur oleh peraturan daerah (PERDA) dan sejalan aturan undang-undang yang berlaku. Memiliki fungsi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan tanggung jawab pendanaan kepada pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, yang mencerminkan peluang lokal dalam bentuk nyata dari proses pelimpahan sebagian kekuasaan administratif dari pusat ke tingkat daerah agar pengambilan keputusan lebih dekat dengan Masyarakat yang disebut desentralisasi.

PAD terdiri atas empat kategori utama, yaitu:

### 1. **Pajak Daerah**

Ialah sumber pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib pajak di wilayah administrasi tertentu, lalu dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

### 2. **Retribusi Daerah**

Ialah pendapatan yang diterima melalui biaya pelayanan atau pemberian izin khusus yang diselenggarakan oleh otonomi daerah kepada masyarakat dengan dasar hukum yang telah ditetapkan.

### 3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Ialah Penerimaan yang diterima dari pengelolaan aset daerah yang terpisah, misalnya; usaha daerah dan investasi.

### 4. **Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah**

Yakni Penerimaan sah lain yang bersumber dari sumber selain ketiga kategori di atas, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

### **Efektivitas Pajak**

Efektivitas merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mewujudkan target yang telah dirancang sebelumnya. Ketika tujuan tersebut berhasil diraih, maka mengindikasikan bahwa jalannya organisasi telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Fokus utama dari efektivitas adalah pada pencapaian hasil, bukan pada prosesnya—apakah program atau kegiatan yang direncanakan telah menghasilkan keluaran sesuai target. Menurut Halim dan Kusufi (2014), efektivitas diukur dari hasil akhir layanan dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Sementara itu, dalam regulasi yang tertuang dalam Permendagri No. 13

Tahun 2006 sebagai acuan dalam sistem pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam merealisasikan capaian program sejalan dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Merujuk pada pemaparan definisi sebelumnya, dapat disimpulkan Efektivitas merujuk pada seberapa jauh suatu aktivitas mampu memenuhi target atau sasaran yang telah direncanakan sebelumnya pencapaian target dari suatu program atau kegiatan. Dalam konteks pengukuran efektivitas pajak secara lebih detail, penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria yang tertuang dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994, yang mengatur pedoman terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Kriteria tersebut dirangkum dan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1** Rasio Efektivitas

<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

**Sumber :** Kepmendagri No. 690.900.327, Depgari

### **Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Sebagai upaya menjalankan fungsi pemerintahan yang berada dalam lingkup kewenangan daerah, diperlukan dukungan keuangan yang memadai agar

elalui kewenangannya, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan layanan publik dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya. Ketersediaan sumber pendanaan bagi daerah harus proporsional dengan tanggung jawab dan beban kewenangan yang dialihkan. Penyerahan sumber keuangan, baik dalam bentuk penerimaan dari pajak dan retribusi daerah maupun alokasi dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, merupakan bentuk tanggung jawab fiskal yang menyertai pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah, sesuai prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah, pemerintah daerah berperan sebagai pengatur sekaligus penanggung jawab utama atas pemanfaatannya secara efektif dan efisien. Dan perlu menyusun program untuk mengatur terkait rencana pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah. Program yang digunakan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerah adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kodefikasi 5.02.04 diatur secara resmi dalam Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021. Regulasi ini memuat rangkaian dari proses Tahapan peninjauan, pengujian keabsahan, dan perbaikan terhadap struktur klasifikasi, kode sistem, dan nomenklatur yang terkait dengan penyusunan strategi pengembangan wilayah serta pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Program tersebut mengatur Kegiatan, Sub kegiatan, Sumber Dana, Target, rincian belanja, dan Anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka tata kelola penerimaan keuangan yang berasal dari wilayah pemerintahan daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah mencakup satu kegiatan utama yang dijabarkan ke dalam 15 sub-kegiatan yang saling mendukung dalam rangka

optimalisasi pendapatan daerah. Rincian kegiatan dan subkegiatan dari Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2 berikut.



**Tabel 2.2** Kegiatan Sub-Kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

<b>KODE</b>	<b>NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>
<b>5.02.04.2</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	-
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	-
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber : Kepmendagri no 050-5889

### 2.3 Penelitian Relevan

Berikut adalah table Penelitian Relevan yang tersaji pada table 2.3

**Tabel 2.3** Penelitian Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Alat analisis	Hasil Penelitian
1.	Syahril Effendi (2021)	Variabel Independen X1 = Efektifitas pajak parkir X2 = Kontribusi pajak parkir X3 = Efektifitas dan kontribusi berpengaruh signifikan  Variabel Independen Y = Pendapatan Asli Daerah  Sampel = Data PAD kota Batam tahun 2015 - 2019  Alat Analisis SEM PLS	Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir secara simultan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam.
2	Amelia & Ishak (2023)	Variabel Independen X1 = Pajak Restoran X2 = Pajak Hiburan X3 = Pajak Hotel X4 = Pajak Penerangan Jalan  Variabel Independen Y = Pendapatan Asli Daerah  Sampel = Data PAD kota Cimahi tahun 2016 - 2020	a. Pajak restoran dan hotel menunjukkan hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. b. Pajak hiburan dan pajak penerangan jalan memiliki arah hubungan yang negatif terhadap

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Alat analisis	Hasil Penelitian
		Alat Analisis SEM PLS	PAD, namun keduanya juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. c. Secara simultan, pajak restoran, hiburan, hotel, dan penerangan jalan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD di Kota Cimahi. d. Tingkat kontribusi pajak restoran, hiburan, dan hotel terhadap PAD tergolong sangat rendah, sedangkan kontribusi dari pajak penerangan jalan berada dalam kategori kurang.
3.	Seruni <i>et al.</i> , (2023)	Variabel Independen X1 = Efektifitas pajak daerah X2 = Efisiensi Pajak Daerah  Variabel Independen Y = Pendapatan Asli Daerah  Sampel = anggaran dan realisasi pajak daerah tingkat I dan II di provinsi banten tahun 2014-2017  Alat Analisis SEM PLS	Efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4.	Rina & Khozin (2020)	Variabel Independen X1 = Efektifitas pajak daerah X2 = Efisiensi Pajak Daerah  Variabel Independen Y = Pendapatan Asli Daerah  Sampel = anggaran dan realisasi pajak daerah tingkat I dan II di provinsi banten tahun 2014-2017	Tingkat efektivitas pajak daerah tidak menunjukkan pengaruh yang positif maupun signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, kontribusi pajak daerah memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD.

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Alat analisis	Hasil Penelitian
		Alat Analisis SPSS	
5.	Ekky <i>et al.</i> (2024)	<p>Variabel Independen  X1 = pajak hotel  X2 = pajak restoran  X3 = pajak hiburan  X4 = Pajak Penerangan Jalan  X5 = Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan</p> <p>Variabel Independen  Y = Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Sampel = anggaran dan realisasi pajak daerah tingkat I dan II di provinsi banten tahun 2014-2017</p> <p>Alat Analisis SPSS</p>	<p>Pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak penerangan jalan terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karawang. Sementara itu, pajak restoran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Karawang. Secara bersama-sama, pajak hotel, restoran, hiburan, dan penerangan jalan memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Karawang sebesar 71,4%.</p>

Sumber : Diolah penulis, 2024

## 2.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

### 2.4.1 Kerangka Teoritis

#### 2.4.1.1 Efektivitas Pajak berpengaruh positif terhadap PAD

Efektivitas pajak daerah dapat diartikan sebagai Tingkat pencapaian realisasi penerimaan pajak merupakan perbandingan antara jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan dengan target pendapatan dari pajak yang telah direncanakan untuk dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu sebelumnya. Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pendapatan dari sektor pajak dalam periode tertentu. Kenaikan efektivitas pajak berimplikasi pada besarnya kontribusi pajak diterima terhadap keuangan daerah. Fakta ini

mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berhasil memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimilikinya. Salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah adalah pajak daerah itu sendiri, sehingga peningkatan efektivitas pajak akan berdampak langsung terhadap meningkatnya PAD.

Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan pajak merupakan bagian dari kinerja strategis pemerintah daerah dalam mengelola sumber dayanya. Fenomena ini konsisten dengan konsep yang diusung oleh RBT, mengungkapkan bahwa keunggulan suatu organisasi terletak pada kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya internal—baik tangible maupun intangible—untuk menghasilkan kinerja yang berkelanjutan (Lubis, 2023). Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya berupa sistem, regulasi, serta potensi pendapatan dari pajak secara optimal agar mampu meningkatkan PAD sebagai indikator utama kemandirian fiskal daerah.

Oleh karena itu, disimpulkan efektivitas pajak berkontribusi berkontribusi secara menguntungkan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Semakin efektif pengelolaan dan realisasi pajak daerah, semakin besar pula potensi peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Seruni et al. (2023), Studi ini menyatakan efektifitas pengelolaan pajak daerah terbukti memberikan dampak yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, hipotesis yang dikemukakan dalam studi ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Efektivitas pajak daerah berdampak positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

#### **2.4.1.2 Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap PAD**

Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan daerah. Program tersebut mengatur Kegiatan, Sub kegiatan, Sumber Dana, Target, rincian belanja, dan Anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah. Kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam program itu akan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerah. Semakin besarnya anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah akan membuat pemerintah daerah semakin leluasa dan aktif dalam mengelola pendapatan daerah.

Dalam mengelola suatu hal diperlukan sumber daya uang untuk membiayai pengeluaran yang muncul dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan unsur manajemen menurut George R. Terry (1992) yang menyebutkan bahwa unsur Manajemen terdiri dari enam elemen penting yang dikenal sebagai 6M, yaitu: 1) Man (Manusia) Sumber daya manusia yang menjalankan dan mengelola seluruh aktivitas organisasi. Faktor ini mencakup kompetensi, motivasi, dan kinerja individu dalam mencapai tujuan. 2) Money (Uang) Modal atau sumber keuangan yang digunakan untuk mendukung operasional dan pengembangan organisasi. 3) Method (Metode) Cara, sistem, atau prosedur kerja yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. 4) Material (Bahan) Segala

jenis bahan baku atau sumber daya fisik yang diperlukan dalam proses produksi atau layanan. 5) Machine (Mesin) Teknologi atau alat bantu yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. 6) Market (Pasar) Sasaran atau tempat pemasaran produk/jasa, yang mencakup pemahaman terhadap kebutuhan konsumen dan dinamika pasar. Unsur Money atau uang dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat dilihat dari anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Menurut Suhartati dan Fathorrozi (2003), biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, yaitu dengan mengaitkan antara pengeluaran yang dikeluarkan dan produk atau output yang dihasilkan. Berdasarkan pendekatan ini, biaya terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Biaya-Variabel (Variable-Cost):

Merupakan biaya yang mengalami perubahan sejalan dengan tingkat produksi atau aktivitas. Dengan meningkatnya jumlah output yang diproduksi, biaya ini juga akan bertambah secara proporsional. Contohnya termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional yang berfluktuasi tergantung pada tingkat kegiatan.

2. Biaya-Tetap (Fixed-Cost):

Merupakan biaya yang nilainya konsisten dan tidak mengalami perubahan walaupun terjadi fluktuasi kapasitas produksi periode waktu tertentu. Dan juga biaya ini tetap harus dibayar, terlepas dari besar kecilnya aktivitas produksi. Contohnya seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai tetap, dan penyusutan aset tetap.

Pembagian ini penting dalam analisis manajerial karena meringankan dalam pengambilan keputusan yang terintegrasi dengan efisiensi, perencanaan anggaran, serta evaluasi kinerja keuangan organisasi. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah mengatur 15 kegiatan yang memiliki output berbeda beda sebagaimana tabel 2.2. dari output yang dihasilkan oleh 15 subkegiatan tersebut terdapat 9 subkegiatan yang akan berdampak langsung pada besaran penerimaan pajak atau variable cost.



**Tabel 2.4** Jenis Biaya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Fixed Cost</i>
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Variabel Cost</i>
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Fixed Cost</i>
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Fixed Cost</i>
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<i>Variabel Cost</i>
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Fixed Cost</i>
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<i>Variabel Cost</i>
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	<i>Variabel Cost</i>
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<i>Variabel Cost</i>
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<i>Variabel Cost</i>
11	Penagihan Pajak Daerah	<i>Variabel Cost</i>
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	<i>Variabel Cost</i>
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Variabel Cost</i>
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<i>Fixed Cost</i>
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	<i>Fixed Cost</i>

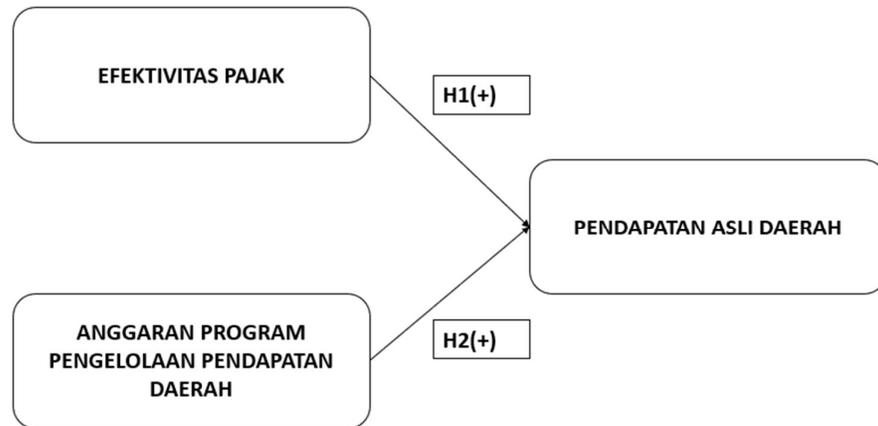
**Sumber :** Bapenda, 2024

Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis dalam rangka mengelola pendapatan daerah secara optimal. Program ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi atas beragam upaya yang diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, baik dari aspek pajak, retribusi, maupun sumber-sumber lain yang sah. Dengan kata lain, anggaran program ini tidak hanya mencerminkan alokasi dana, tetapi juga representasi dari prioritas dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan fiskal daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah yang dirancang melalui anggaran program tersebut sangat menentukan efektivitas dan efisiensi proses pemungutan, pencatatan, hingga pelaporan keuangan daerah. Ketepatan alokasi dan pelaksanaan anggaran pada program ini ditargetkan dapat menghasilkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, dan akuntabel, serta berbasis hasil (*outcome-based*).

#### 2.4.2 Kerangka Penelitian

Model kerangka penelitian menempatkan Efektivitas Pajak dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai variabel independen, serta PAD sebagai variabel dependen. Model kerangka penelitian yang menjadi dasar studi ini disajikan pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2. 1.** Kerangka Penelitian

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- **H1:** Efektivitas pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin tinggi efektivitas pajak, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD.

- **H2:** Anggaran program pengelolaan pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin besar alokasi anggaran untuk pengelolaan pendapatan daerah, maka semakin besar pula potensi peningkatan PAD.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Studi ini menerapkan metode kuantitatif untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. berdasarkan data yang dapat diukur secara numerik. Pendekatan kuantitatif menekankan pada objektivitas, pengukuran, dan analisis statistik, dengan demikian, hasil penelitian bisa diterapkan secara umum pada populasi yang lebih besar. Dalam metode ini, data dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik statistik guna mengetahui hubungan antar variabel, mengukur tingkat pengaruh, serta melakukan verifikasi terhadap hipotesis yang sudah disusun sebelumnya. Strategi ini sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin memperoleh hasil yang terukur, sistematis, dan dapat diuji secara empiris, sehingga mendukung validitas dan reliabilitas penelitian. Proses penelitian dalam metode kuantitatif memiliki sifat deduktif yang artinya konsepp atau teori diperlukan untuk menjawab rumusan masalah sehingga dapat dirumuskan dalam hipotesis. Selanjutnya, hipotesis diuji dengan data-data dari lapangan yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau inferensial (Sugiono, 2017).

Analisis regresi merupakan Teknik statistik yang dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Fokus utama dari analisis ini terletak yakni mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan digunakan untuk meramalkan hasil variabel dependen melalui informasi dari variabel independen. Teknik ini memodelkan serta menganalisis keterkaitan antar variabel dependen (tak bebas) dengan satu / lebih variabel

independen (prediktor), guna memahami pola hubungan di antara variabel-variabel tersebut (Armstrong, 2012).

### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.2.1 Populasi**

Sugiyono (2017), menyampaikan populasi adalah keseluruhan elemen dalam suatu wilayah yang menjadi sasaran generalisasi penelitian, melibatkan objek dan subjek dengan ciri khas atau karakteristik yang spesifik. Populasi pemilihan ini berada di bawah kendali peneliti sebagai ruang lingkup utama kajian, yang kemudian akan dianalisis guna menghasilkan kesimpulan yang dapat merepresentasikan keseluruhannya. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang dijadikan objek kajian adalah data realisasi bulanan yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, serta anggaran program tata kelola pendapatan daerah di Kab. Bojonegoro, yang tercatat sejak Januari 2021 hingga Desember 2023.

#### **3.2.2 Sampel**

Dimaksud dengan sampel yakni bagian daripada populasi yang mencerminkan karakteristik tertentu lalu dijadikan sebagai sumber data untuk menarik kesimpulan umum (Sugiyono, 2017). Agar hasil penelitian dapat merepresentasikan populasi secara akurat, pemilihan sampel harus dilakukan secara cermat dan tepat. Dalam studi ini, peneliti menerapkan teknik sampling jenuh, yakni strategi pemilihan responden dengan melibatkan semua individu dalam populasi. Data yang digunakan berupa realisasi bulanan dari Januari 2021 hingga Desember 2023, yang meliputi PAD, pajak daerah, serta anggaran program

pengelolaan pendapatan daerah Kab. Bojonegoro. Total sampel yang dianalisis berjumlah 36 data.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

**Sumber utama studi ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),** yang mencerminkan pencapaian penerimaan dan pengeluaran anggaran secara riil dalam suatu periode fiskal. Dokumen ini digunakan sebagai dasar analisis karena menggambarkan secara konkret kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya perihal P A D, realisasi pajakk daerah, serta pelaksanaan anggaran program pengelolaan pendapatan. Dalam hal ini LRA yang dijadikan sumber adalah periode 2021, 2022, dan 2023. Laporan tersebut dirinci secara bulanan dengan terkhususkan pada PAD dan Pajak Daerah. Data tersebut didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Data pajak realisasi pajak daerah akan digunakan penulis untuk mengukur Efektivitas Pajak. Selain LRA penulis juga menggunakan data laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik / non fisik tahun 2021-2023 setiap bulannya untuk mendapatkan data pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Riset ini mengaplikasikan metode dokumentasi sebagai strategi utama dalam pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan mencatat dokumen resmi yang relevan dengan variabel penelitian. Teknik ini dipilih karena mampu memberikan data sekunder yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti laporan realisasi anggaran, dokumen kebijakan, serta arsip pendapatan daerah yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Teknik ini dilakukan dengan

menelusuri dan menghimpun data yang tercantum dalam dokumen tertulis didalam objek penelitian. Metode dokumentasi dapat diterapkan untuk menyelidiki data masa lalu secara sistematis dan objektif. Dalam konteks penelitian ini, tujuan dari studi dokumentasi adalah untuk melakukan analisis mengenai pengaruh Efektivitas Pajak dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 3.5 Definisi Operasional

Table 3.1 dibawah ini menyajikan penjabaran teknis variabel-variabel yang digunakan sebagai dasar pengukuran guna mengetahui Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 3.1** Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
<b>Variabel Dependen</b>			
1.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pemasukan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah melalui pemungutan yang didasarkan pada peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Ln Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)
<b>Variabel Independen</b>			
1.	Efektivitas Pajak Daerah	Efektivitas Pajak Daerah adalah seberapa jauh target pajak daerah telah dicapai	Realisasi Pajak Daerah dibagi Target Pajak Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
		(Permendagri no 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)	Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)
2.	Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah adalah anggaran yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengelolaan pendapatan daerah. (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Ln Jumlah realisasi anggaran sub kegiatan yang bersifat <i>variable cost</i> yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)

Dalam penelitian ini, data diubah ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) untuk memudahkan interpretasi parameter sebagai elastisitas. Penggunaan logaritma natural bertujuan untuk meredam fluktuasi data yang berlebihan, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017). Metode ini hanya dapat diterapkan pada data yang bernilai positif dan tidak berlaku untuk data negatif. Model log natural memiliki beberapa keunggulan, antara lain: memberikan interpretasi koefisien yang lebih sederhana, membantu mengatasi permasalahan statistik seperti heteroskedastisitas, serta mudah diterapkan dalam proses perhitungan analisis.

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Deskriptif

Penggunaan statistik deskriptif bertujuan untuk menelaah dan menyajikan data secara ringkas dalam penggambaran pola, kecenderungan, ataupun karakteristik data yang dikumpulkan, tanpa melakukan generalisasi dari temuan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan bantuan melalui statistik deskriptif, diperoleh pemahaman awal tentang pola dan sifat data

yang ditelusuri (Sugiyono, 2017). Sebutkan min, max, mean, median, standar deviasi.

Statistik deskriptif termasuk menghitung modus, median (nilai tengah), mean, dan standar deviasi (Sugiono, 2017). Simpangan baku merupakan indikator yang mengilustrasikan tingkat penyebaran atau variasi dalam kumpulan data ataupun penyebaran data dalam suatu kelompok, serta menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data menyimpang dari rata-rata (Wahyuni, 2020). Wahyuni (2020) juga menyebutkan bahwa nilai minimum dan nilai maksimum diperlukan dalam analisis data statistic deskriptif. Analisis statistik deskriptif dapat dilakukan dengan bantuan software SPSS.

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah data dalam sampel memiliki pola distribusi yang menyerupai distribusi normal. Dalam konteks analisis regresi linier, keberadaan distribusi normal pada error merupakan salah satu syarat fundamental yang harus dipenuhi agar interpretasi hasil uji statistik dapat dipercaya. Suatu model regresi dikatakan layak jika residual atau galatnya terdistribusi secara normal atau setidaknya mendekati pola tersebut.

Pada uji normalitas pada studi ini diterapkan melalui pendekatan Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan bantuan program SPSS versi 20.0. Berdasarkan panduan dari Singgih Santoso (2012), penentuan normal atau

tidaknya distribusi data didasarkan pada nilai *Asymptotic Significance*. Apabila nilai signifikansi tersebut  $> 0,05$ , maka data dianggap normal. Sebaliknya, jika nilainya  $< 0,05$ , maka data tersebut dinilai menyimpang dari distribusi normal.

### 3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi kuat antar variabel independen dalam model regresi. Kehadiran hubungan yang terlalu kuat di antara variabel bebas dapat menimbulkan distorsi terhadap estimasi model, sehingga mengganggu validitas hasil analisis. Regresi yang baik mestinya memenuhi kriteria yang menunjukkan bahwa variabel independent satu dengan yang lain tidak saling memengaruhi secara signifikan (Ghozali, 2011). Untuk mengidentifikasi gejala ini, difungsikan dalam dua indikator utama, yakni nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* berada di atas 0,10 dan VIF dibawah dari 10, hal ini diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model. Sebaliknya, apabila *tolerance* kurang atau sama dengan 0,10 dan VIF lebih atau sama dengan 10, maka hal tersebut mengindikasikan terdapat gejala-multikolinieritas yang perlu ditangani di dalam model.

### 3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dalam analisis regresi di mana varians dari residuals atau galat tidak konstan antar pengamatan. Artinya, terdapat perbedaan penyebaran error pada satu observasi

dibandingkan dengan lainnya. Pada model yang baik, diharapkan varians residual bersifat homogen atau konstan (homoskedastisitas). Namun, dalam data bertipe cross section—yang umumnya terdiri dari berbagai unit analisis dengan karakteristik yang sangat beragam—masalah heteroskedastisitas sering kali muncul (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi hal ini, penelitian ini menggunakan uji Glejser yang dijalankan melalui software SPSS. Mengacu pada panduan dari Iba dan Wardhana (2024), hasil uji dianggap bebas dari masalah ataupun gejala heteroskedastisitas jika nilai significant pada *p-value* lebih besar dari 0,05. Diartikan dengan asumsi klasik regresi dapat terpenuhi, dan hasil analisis regresi pun menjadi lebih dapat diandalkan.

#### 3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan mengidentifikasi model regreslinier terdapat hubungan antara error pada satu period dengan *error* di period sebelumnya (Janie, 2012). Artinya, uji ini memeriksa apakah nilai residual pada waktu  $t$  menunjukkan korelasi dengan residual pada waktu sebelumnya, yaitu  $t-1$ . Dalam analisis autokorelasi, Uji Durbin-Watson (DW) menjadi metode yang banyak digunakan dan dapat diakses melalui aplikasi SPSS. Model regresi dianggap bebas dari autokorelasi jika nilai DW berada di antara batas bawah dan batas atas, yaitu:  $d_u < DW < 4 - d_u$ , di mana  $d$  adalah nilai Durbin-Watson hasil perhitungan dan  $d_u$  adalah nilai batas atas menurut tabel DW.

### 3.6.3 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi difungsikan dalam memprediksi perubahan variabel dependen (Y) atas dasar variasi pada dua atau lebih variable independen (X) (Sugiyono, 2017). Model ini disebut model regresi linier berganda diterapkan saat terdapat beberapa variabel bebas dalam analisis. Studi ini, yang menggunakan dua variabel prediktor, formula regresi linier berganda yang dijadikan alat analisis dalam studi ini:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

**Keterangan:**

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- X<sub>1</sub> = Efektivitas Pajak
- X<sub>2</sub> = Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- b<sub>1</sub> = Koefisien regresi untuk efektivitas pajak
- b<sub>2</sub> = Koefisien regresi untuk anggaran pengelolaan pendapatan daerah
- ε = Error atau gangguan residu dalam model

#### 3.6.3.1 Uji Kelayakan Model

##### 3.6.3.1.1. Uji F

Pengujian F digunakan guna mengetahui kelayakan model regresi secara bersamaan bagaimana variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Dengan kata lain, pengujian ini bertujuan menilai apakah kombinasi faktor-faktor independen dalam model menyimpan keterkaitan bermakna dengan variabel dependen

Terdapat dua strategi yang umum digunakan dalam pengambilan keputusan uji F.

Pertama, melalui perbandingan antara nilai  $F_{hitung}$  dan nilai  $F_{tabel}$  dalam model. Jika

$F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  (referensi dari *table* distribusi), maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diyakini benar, yang berarti secara kolektif, variabel-variabel bebas memberikan kontribusi yang berarti terhadap perubahan variabel terikat/yang dipengaruhi. Namun, apabila nilai  $F$  yang dihasilkan analisis tidak melampaui ambang batas nilai kritis ( $F_{hitung} < F_{tabel}$ ), maka hipotesis-nol ( $H_0$ ) terpenuhi.

Pendekatan kedua menggunakan nilai signifikansi (p-value atau sig.). Jika nilai signifikans.  $< 0,05$ , maka  $H_0$  tidak dapat terpenuhi dan  $H_a$  terpenuhi, hal ini memiliki makna bahwa model regresi mengindikasikan terdapat efek nyata dengan kolektif dari semua variabel independent. Sebaliknya, jika signifikans.  $> 0,05$ , maka tidak ada / tidak ditemukan hubungan yang bermakna ketika semua variabel diuji secara serentak.

Dengan demikian, hasil dari uji  $F$  mencerminkan kekuatan hubungan kolektif antara seluruh kontribusi variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen melalui model regresi.

#### **3.6.3.1.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi atau  $R^2$  merupakan indikator statistic yang dimanfaatkan guna mengevaluasi tingkat kemampuan variabel bebas dalam menggambarkan perubahan yang terjadi pada variabel terikat dalam model regresi. Nilai  $R^2$  berada dalam kisaran antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ), dan memberikan gambaran mengenai kekuatan prediksi model.

1. Jika nilai  $R^2$  mendekati angka 1, artinya sebagian besar Variasi pada variabel terikat dapat dipahami melalui pengaruh variabel bebas yang

terdapat dalam model. Kondisi ini mencerminkan bahwa model mampu memberikan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi.

2. Sebaliknya, apabila nilai  $R^2$  cenderung mendekati 0, ini mengindikasikan bahwa model membatasi penjelasan pada segmen kecil dari variasi variabel terikat secara keseluruhan. Dengan kata lain, masih banyak faktor eksternal lain yang berperan dalam memengaruhi variabel dependen yang tidak disertakan dalam perancangan model.

Secara umum, interpretasi nilai  $R^2$  dapat diklasifikasikan. Ketika nilai  $R^2$  menyentuh angka yang hampir nol, temuan ini mencerminkan bahwa keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat begitu lemah. Artinya, model yang digunakan kurang mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Sebaliknya, apabila  $R^2$  mendekati satu, oleh karena itu ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel-variabel dalam model cukup kuat. Struktur model yang dimaksud dinilai efektif dalam menggambarkan sebagian besar variasi yang terdapat pada data. Oleh karena itu, koefisien determinasi ( $R^2$ ) berperan sebagai salah satu ukuran utama dalam menilai seberapa baik model regresi mampu menyesuaikan diri terhadap data yang diamati atau mencerminkan tingkat kelayakan model (*goodness of fit*) dalam suatu penelitian.

### **3.6.3.2 Uji Hipotesis**

#### **3.6.3.2.1. Uji t**

Pengujian t bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen satu per satu terhadap variabel dependen. Melalui pengujian koefisien regresi tiap variabel bebas, uji t membantu mengidentifikasi seberapa besar kontribusi variabel

tersebut terhadap variabel terikat dengan terpisah. Pengujian t dilakukan guna mengetahui tingkat kontribusi individual dari setiap variabel independen, yaitu Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, secara parsial memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah akhir dalam memutuskan diterima atau tidaknya suatu hipotesis ditentukan berdasarkan nilai probabilitas (p-value) dengan batas nilai sig.  $\alpha = 0,05$ , yaitu:

1. Jika nilai probabilitas melebihi besarnya dari 0,05, maka hipotesis tidak terpenuhi.
2. Jika nilai probabilitas dibawah dari nilai  $\alpha$  0,05, maka hipotesis diyakini benar.
3. Namun, apabila hasil menunjukkan arah pengaruh yang bertentangan dengan hipotesis meskipun nilai probabilitas sudah signifikan, maka hipotesis tetap ditolak.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

Riset ini berfokus kepada analisis realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Informasi utama yang menjadi rujukan dalam studi ini berasal dari data sekunder, yang mencakup realisasi bulanan yang meliputi tiga variabel utama, yaitu Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Seluruh populasi dijadikan sampel melalui pendekatan sampling jenuh, data yang tersedia selama periode pengamatan digunakan secara lengkap tanpa pengambilan sampel secara acak. Data yang dikumpulkan mencakup periode dari Januari 2021 hingga Desember 2023, sehingga total sampel yang dianalisis adalah 36 data bulanan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pola dan perkembangan realisasi keuangan daerah selama tiga tahun terakhir.

#### **4.2 Hasil Uji Data**

##### **4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif diperoleh dari awal bulan Januari pada tahun 2021 hingga akhir bulan Desember pada tahun 2023 atas PAD, Pajak Daerah, dan Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Statistik deskriptif ini memiliki sasaran dalam menyajikan ringkasan

data berupa nilai terendah, tertinggi, rata-rata, serta tingkat penyebarannya melalui standar deviasi. Variabel independen pada riset ini adalah Efektivitas Pajak Daerah dan Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah serta variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah. Rangkuman data deskriptif dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.1 bawah ini:

**Tabel 4.1 *Statistic Descriptive***

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ln_y (PAD)	36	22.65	26.34	24.8068	.65716
ln_x1 (Efektivitas Pajak Daerah)	36	4.16	5.42	4.7599	.33113
ln_x2 (Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah)	36	.00	21.15	16.9960	5.65251
Valid N (listwise)	36				

**Sumber :** Data output SPSS, 2025

Tabel 4.1 tersebut menyatakan analisis data sebanyak 36 data sampel yang diperoleh dari LRA Bapenda Kabupaten Bojonegoro periode Bulan Januari – Desember, 2021-2023. Dibawah ini adalah analisis dari variabel berdasarkan tabel diatas:

- a. Data deskriptif PAD menunjukkan nilai terendah ln 22.65, sedangkan nilai tertinggi adalah ln 26.34. Nilai mean atau rata-rata green accounting senilai ln 24.8068 dengan std. deviasi menunjukkan nilai 0,65716. Nilai std.

deviation dibawah dari nilai mean yang menandakan pada variabel PAD ditemukan penyimpangan data yang rendah dan persebaran yang merata.

- b. Data deskriptif Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan nilai terendah ln 4.16, sedangkan nilai tertinggi adalah ln 5.42. Nilai mean atau rata-rata Efektivitas Pajak Daerah senilai ln 4.7599 dengan standar deviasi menunjukkan nilai 0,33113. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menandakan bahwa variabel Efektivitas Pajak Daerah ditemukan penyimpangan data yang rendah dan persebaran yang merata.
- c. Data deskriptif Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan nilai terendah ln 0.00 yang terjadi di pertengahan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena bendahara pengeluaran Bapenda Kabupaten Bojonegoro menderita penyakit covid sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya selama beberapa bulan, sedangkan nilai tertinggi adalah ln 21.15. Nilai mean atau rata-rata Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah senilai ln 16.9960 dengan standar deviasi menunjukkan nilai 5.65251. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menandakan bahwa variabel Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah ditemukan penyimpangan data yang rendah dan persebaran yang merata.

#### 4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Sampel K-S**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N	36		
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0	
	Std. Deviation	1	
Most Extreme Differences	Absolute	.221	
	Positive	.168	
	Negative	-.221	
Kolmogorov-Smirnov Z		1.328	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.048 <sup>c</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.042
		Upper Bound	.054
a. Test distribution is Normal.			
b. User-Specified			
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744.			

**Sumber :** Data output SPSS, 2025

Dilihat dari tabel 4.1 diatas, Hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. 0,059 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena hasil tersebut menunjukkan signifikansi yang lebih tinggi dari batas 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel efektivitas pemungutan pajak, anggaran program pengelolaan pendapatan daerah, dan pendapatan asli daerah memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan untuk analisis statistik selanjutnya. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, analisis pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan anggaran program pengelolaan pendapatan daerah terhadap

pendapatan asli daerah dapat dilakukan secara valid dan reliabel menggunakan metode parametrik seperti regresi linier. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menyajikan ilustrasi empiris akurat tentang hubungan antara variabel tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

## 2. Uji Multikolinieritas

Pengujian dilakukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi kuat antar variabel independen dalam model regresi. Kehadiran hubungan yang terlalu kuat di antara variabel bebas dapat menimbulkan distorsi terhadap estimasi model, sehingga mengganggu validitas hasil analisis. Regresi yang baik mestinya memenuhi kriteria yang menunjukkan bahwa variabel independent satu dengan yang lain tidak saling memengaruhi secara signifikan (Ghozali, 2011).

Untuk mengidentifikasi gejala itu, terdapat dua indikator utama yang dapat digunakan, yaitu nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Secara umum, apabila nilai *tolerance* melebihi 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* berada di bawah angka 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai *tolerance* berada di bawah atau sama dengan 0,10 dan *VIF* mencapai atau melebihi angka 10, maka kondisi tersebut mengindikasikan adanya multikolinieritas yang signifikan dalam model regresi dan perlu ditindaklanjuti, misalnya melalui penghapusan variabel, transformasi data, atau penggunaan pendekatan regresi alternatif seperti *ridge regression*.

Pengujian terhadap multikolinieritas pada riset ini secara rinci pada tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3 Hasil uji multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ln_x1	.991	1.009
	ln_x2	.991	1.009

a. Dependent Variable: ln\_y

Sumber : Data output SPSS, 2025

Dilihat dari tabel 4.3, Hasil uji multikolinieritas, nilai tolerance untuk variabel X1 (efektivitas pemungutan pajak) dan X2 (anggaran program pengelolaan pendapatan daerah) masing-masing sebesar 0,991, melebihi dari batas minimal 0,1. Dan juga, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk kedua variabel tersebut adalah 1,009, temuan ini lebih kecil atau dibawah batas minimal 10. Kondisi ini memperlihatkan bahwa variabel independen dalam model tidak mengalami gangguan multikolinieritas yang signifikan. Maka dari itu, seluruh variabel yang digunakan dalam model dapat dipastikan tidak menunjukkan korelasi yang berlebihan satu sama lain, sehingga hasil uji regresi yang dilakukan terbukti keabsahannya. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan dalam mengukur pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan anggaran program pengelolaan pendapatan daerah terhadap pendapatan asli daerah.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas berfungsi untuk mendeteksi adanya ketidakseragaman varians error dalam model regresi pada setiap nilai pengamatan. Kondisi ini menandakan bahwa varians residual tidak konstan (homoskedastis), sehingga dapat mengganggu validitas model estimasi. Untuk mengetahui apakah terdapat heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser sebagai alat

deteksi. Mengacu pada Ghozali (2021), uji Glejser merupakan bentuk pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pola penyimpangan varians dari residual dalam model regresi.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara nilai absolut residual dan variabel independen melalui regresi dalam model. Interpretasi pengujian ditentukan oleh nilai signifikansi (Sig.): apabila nilai Sig. melebihi dari 0,05, maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model. Sebaliknya, apabila nilai Sig. dibawah batas dari 0,05, maka menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas yang perlu diperhatikan didalam pemodelan regresi.

**Tabel 4.4 Hasil uji multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.077	1.120		.961	.344
	ln_x1	-.078	.234	-.057	-.335	.740
	ln_x2	-.017	.014	-.211	-1.241	.223

a. Dependent Variable: abs\_res

Sumber : Data output SPSS, 2025

Dilihat pada Tabel 4.4 Hasil pengujian heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel ln\_x1 adalah 0,740, sedangkan untuk ln\_x2 sebesar 0,223, keduanya melebihi batas signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, varians residual atau galat

tersebar secara konsisten di setiap tingkat nilai variabel bebas. Kondisi ini menunjukkan kepatuhan terhadap salah satu syarat klasik dalam analisis regresi linier maka dari itu model regresi dapat dianggap valid dan hasil analisis dapat diinterpretasikan secara akurat dalam menguji pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan anggaran program pengelolaan pendapatan daerah terhadap pendapatan asli daerah.

#### 4. Uji Autokolerasi

Ghozali (2018), uji autokorelasi diterapkan guna menilai ada tidaknya hubungan antara kesalahan (error term) dalam rentang waktu yang ditentukan dengan kesalahan pada rentang waktu lainnya dalam model regresi. Adanya autokorelasi dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam perkiraan parameter dan melemahkan validitas model.

Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Dasar keputusan didasarkan pada nilai  $DU < DW < 4 - DU$ , yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Dengan kata lain, apabila nilai Durbin-Watson berada di antara dua batas tersebut, maka model dinilai bebas dari masalah autokorelasi.

Informasi lengkap mengenai hasil pengujian autokorelasi dilihat Tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5 Hasil uji autokolerasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.335 <sup>a</sup>	.112	.058	.63778	1.648
a. Predictors: (Constant), ln_x2, ln_x1					
b. Dependent Variable: ln_y					

**Sumber :** Data output SPSS, 2025

Dilihat pada tabel 4.5, pengujian autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson, nilai DW adalah 1,648 dibandingkan dengan nilai tabel DL = 1,354 dan nilai DU = 1,587 untuk total sampel sejumlah 36 dan 2 variabel bebas. Karena nilai DW (1,648) berada di atas DU (1,587) dan di bawah  $4 - DU$  (2,413), lalu ditarik kesimpulan tidak adanya gejala autokorelasi positif maupun negatif dalam model ini. Dengan demikian, residual model tidak menunjukkan pola keterkaitan berurutan yang signifikan, sehingga asumsi independensi residual terpenuhi. Hal ini mendukung validitas model regresi dalam menguji pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan anggaran program pengelolaan pendapatan daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

#### **4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan dan mengukur seberapa besar hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Penelitian ini, variabel independen mencakup Efektivitas Pajak Daerah dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sementara variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Model ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar kontribusi masing-masing faktor terhadap

perubahan PAD. Hasil pengujian regresi berganda yang menggambarkan hubungan tersebut disajikan dalam Tabel 4.6 berikut ini.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.279	1.564		15.526	<,001
	ln_x1	.245	.327	.123	.749	.459
	ln_x2	-.038	.019	-.323	-1.958	.059
a. Dependent Variable: ln_y						

**Sumber :** Data output SPSS, 2025

Dilihat pada tabel 4.6, hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi PAD = 24,279 + 0,245X1 – 0,038X2 + ε. Nilai konstanta (α) sebesar 24,279 dengan signifikansi 0,001 < 0,05 mengindikasikan bahwa ketika variabel independen Efektivitas Pajak Daerah (X1) dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (X2) dianggap konstan, pendapatan asli daerah (PAD) berada pada nilai 24,279. Koefisien regresi Efektivitas Pajak Daerah adalah 0,245 dan nilai signifikansi adalah 0,459 > 0,05 mengindikasikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD, artinya peningkatan efektivitas pemungutan pajak berpotensi meningkatkan PAD namun pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik. Sementara itu, koefisien regresi Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar -0,038 mengindikasikan adanya hubungan negatif; penurunan anggaran program ini diprediksi akan menurunkan PAD, meskipun signifikansi pengaruhnya perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Hasil ini memberikan

gambaran empiris mengenai dinamika pengelolaan keuangan daerah, yang penting untuk strategi optimalisasi pendapatan asli daerah.

#### 4.2.3.1 Hasil Uji Kelayakan Model

##### 1. Uji F

Pengujian F dilakukan untuk mengukur sejauh mana keseluruhan variabel bebas secara serentak memberikan dampak yang berarti pada variabel terikat dalam suatu model regresi. Pengujian ini juga bertujuan untuk menilai kelayakan model secara menyeluruh dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis.

Penilaian terhadap signifikansi model dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (signifikansi). Apabila nilai signifikansi dibawah dari 0,05, dengan demikian diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut dalam kerangka analisis statistik signifikan, sehingga hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dinyatakan diterima. Dengan demikian, seluruh variabel bebas dalam model dinilai berkontribusi secara bersama-sama dalam memengaruhi variabel terikat. Dengan demikian, Uji F menjadi langkah penting dalam menguji kekuatan model secara simultan. Adapun hasil pengujian nilai F pada riset dapat diketahui dengan melihat tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7 Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.692	2	.846	2.080	.141 <sup>b</sup>
	Residual	13.423	33	.407		
	Total	15.115	35			

a. Dependent Variable: ln\_y

b. Predictors: (Constant), ln\_x2, ln\_x1

**Sumber :** Data output SPSS, 2025

Dilihat pada tabel 4.7, hasil uji nilai F didapat nilai signifikansi adalah 0,141 melebihi dari batas signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan hipotesis dari Efektivitas Pajak Daerah dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD ditolak. Hal ini menandakan bahwa variabel yang dimaksud tidak berdampak signifikan secara bersama-sama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam konteks penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan diupayakan adanya evaluasi lebih lanjut terkait penyebab lain yang memengaruhi PAD untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal.

## 2. Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Sugiyono (2022), koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dilakukan guna menilai sejauh mana kapabilitas suatu model regresi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Dalam konteks penelitian ini, analisis menggunakan Adjusted R<sup>2</sup> sebagai indikator untuk mengetahui sejauh mana variabel *Return on Equity (ROE)*, *Current Ratio (CR)*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara kolektif memengaruhi nilai perusahaan (*firm value*). Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* menyajikan

ilustrasi yang lebih tepat disebabkan karena telah disesuaikan dengan keseluruhan variabel yang di uji, sehingga mampu mencerminkan persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel-variabel bebas dengan lebih tepat. Nilai yang kian mendekati 1 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kontribusi model untuk menggambarkan dinamika yang terjadi pada variabel firm value. Adapun hasil lengkap dari pengujian ini dapat ditinjau pada Tabel 4.8 berikut.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.335 <sup>a</sup>	.112	.058	.63778

a. Predictors: (Constant), ln\_x2, ln\_x1

**Sumber :** Data output SPSS, 2025

Dilihat pada Tabel 4.8 hasil analisis nilai Adjusted R Square adalah 0,058 atau 5,8% menunjukkan bahwa model regresi yang mencakup elemen, yakni variabel Efektivitas Pajak Daerah dan Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah hanya mampu menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,8%. Artinya, pengaruh kedua variabel independen terhadap PAD relatif lemah dalam model ini. Sebagian lainnya adalah 94,2% yang dijelaskan di luar model dan tidak dicakup pada hasil penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa masih banyak variabel eksternal lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, investasi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kebijakan fiskal lokal yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar terhadap PAD. Oleh karena itu, saran untuk riset mendatang cakupan variabel yang lebih banyak dan menyebar disarankan agar nantinya memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

#### 4.2.3.2 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian t, atau yang dikenal juga sebagai pengujian secara parsial, bertujuan untuk mengevaluasi dampak setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah. Lewat proses pengujian tersebut, akan terlihat apakah setiap variabel bebas dalam model memiliki kontribusi yang signifikan terhadap variabel terikat ketika dianalisis secara terpisah.

Tindakan menentukan keputusan berdasarkan analisis uji t dilakukan berdasarkan nilai signifikansi statistik dengan probabilitas kepercayaan 95% dan nilai  $\alpha$  0,05.

Adapun kriteria pengujian dibawah ini dijelaskan:

- 1) Apabila nilai signifikansi melebihi dari 0,05, mengindikasikan hipotesis nol ( $H_0$ ) terpenuhi, yang berarti variabel tersebut tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila nilai signifikansi dibawah dari 0,05, mengindikasikan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diyakini benar, hal ini mengindikasikan variabel bebas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Temuan keseluruhan dari pengujian uji t pada riset ini disajikan pada tabel berikut, yang menggambarkan signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara parsial berkaitan dengan valuasi perusahaan.

**Tabel 4.9 Hasil analisis regresi linier berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.279	1.564		15.526	<,001
	ln_x1	.245	.327	.123	.749	.459
	ln_x2	-.038	.019	-.323	-1.958	.059
a. Dependent Variable: ln_y						

**Sumber :** Data output SPSS, 2025

Bedasarkan hasil uji t pada riset ini, interpretasi dampak variabel bebas terhadap variabel terikat secara pasial dipaparkan lengkap dibawah ini:

### **1. Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Pajak Daerah memiliki nilai t sebesar 0,749 dan nilai koefisien B sebesar 0,245 serta nilai signifikansi 0,459 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah berdampak positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa “Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah” ditolak.

### **2. Pengaruh Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki nilai t sebesar -1.958 dan nilai koefisien B sebesar -0,038 serta nilai signifikansi 0,059 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan

hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa “**Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah**” ditolak.

#### 4.3 Hasil Analisis Data

##### 4.3.1 Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pajak menunjukkan efek positif yang tidak mencapai tingkat signifikansi pada PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak dibanding dengan target pajak tidak memengaruhi PAD. Oleh karena itu Pemerintah daerah diharapkan mengelola pajak daerah seefektif mungkin. Hal ini sejalan dengan RBT yang menggambarkan bahwa organisasi terdiri dari berbagai jenis sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi guna menunjang pencapaian target serta mempertahankan performa kerja secara berkelanjutan, baik dalam waktu dekat maupun masa mendatang (Lubis, 2023). Pada temuan ini PEMDA berperan tentang tata kelola sumberdaya berupa penerimaan pajak daerah untuk mencapai tujuannya meningkatkan PAD.

Temuan ini konsisten dengan hasil yang diungkapkan oleh Rina dan Khozin (2020), menyatakan bahwasanya efektivitas pajak daerah tidak berdampak secara signifikan terhadap PAD. Sebaliknya tidak didukung oleh Seruni *et al., a.* (2023); Efendi (2021) mengemukakan fakta bahwa efektifitas pajak berpengaruh positif terhadap PAD.

#### **4.3.2 Pengaruh Anggaran Program pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Anggaran program pengelolaan pendapatan daerah berpengaruh negatif terhadap PAD. Hal ini berarti, semakin efisien anggaran program pengelolaan pendapatan daerah semakin rendah penerimaan PAD. Hasil tersebut berlawanan dengan hipotesis penelitian ini yang menyatakan Anggaran program pengelolaan pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Sejalan dengan RBT, bahwa organisasi terdiri atas kumpulan aset yang dapat digunakan guna mewujudkan target organisasi dan mendukung kinerja organisasi. Sumber daya berupa uang untuk pengelolaan pendapatan daerah dapat dilihat dari anggaran program pengelolaan pendapatan daerah. Suhartati (2003) menjelaskan bahwa Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, yakni dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pengeluaran yang terjadi dan hasil atau produk yang dihasilkan oleh aktivitas organisasi. Berdasarkan sifatnya biaya dapat dikategorikan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Program pengelolaan pendapatan daerah mengatur 15 kegiatan yang memiliki output berbeda beda dengan 9 subkegiatan yang akan berdampak langsung pada besaran penerimaan pajak atau biaya variabel.

Tidak sesuai temuan yang sudah dilaksanakan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat dapat dijelaskan karena adanya fenomena khusus pada tahun 2021 dimana penerimaan PAD khususnya Laba Perusahaan Daerah jauh melewati sasaran yang direncanakan oleh otonomi daerah setempat. Kelebihan target Laba Perusahaan Daerah disebabkan oleh Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD pada tahun 2020 tidak dibagikan pada tahun tersebut namun di tahun berikutnya yakni 2021.



## BAB V

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil evaluasi dan pembahasan yang sudah dilaksanakan melalui pengujian regresi linier berganda terhadap variabel efektivitas pajak dan anggaran program pengelolaan pendapatan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu, berikut adalah poin-poin kesimpulan yang dapat dirumuskan:

1. Efektivitas pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Artinya, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah belum mampu secara nyata meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pajak dipungut, efisiensi atau ketepatan dalam pelaksanaannya belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan PAD.
2. Anggaran program pengelolaan pendapatan daerah berpengaruh negatif terhadap PAD. Hasil ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang lebih besar untuk program pengelolaan pendapatan belum tentu berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, peningkatan anggaran justru diikuti oleh penurunan penerimaan PAD, yang kemungkinan disebabkan oleh penggunaan anggaran yang kurang efisien, tidak tepat sasaran, atau belum optimalnya pelaksanaan program dalam meningkatkan kinerja pendapatan daerah.

## 4.2 Implikasi

Temuan dalam penelitian ini menyajikan kontribusi kepada otonomi daerah Kabupaten Bojonegoro guna memperbesar kontribusi pajak daerah dalam penerimaan PAD. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro harus lebih memperhatikan anggaran program pengelolaan pendapatan daerah supaya lebih efektif untuk meningkatkan PAD. selain implikasi praktis yang sudah disebutkan temuan dari studi ini diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi dan sumber pengetahuan baru dalam dunia akuntansi sekaligus menjadi referensi yang relevan bagi penelitian mendatang.

## 4.3 Keterbatasan Penelitian

Studi ini tidak terlepas dari keterbatasan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. anomali pada data PAD tahun 2021 sehingga mengakibatkan terjadi kenaikan yang sangat signifikan dibanding tahun yang lain
2. Selain itu rendahnya kemampuan variable independent dalam menjelaskan variable dependen dengan besar kemampuan hanya 5,8%.

## 4.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan mempertimbangkan hasil serta analisis yang telah dilakukan, maka saran yang disampaikan untuk agenda penelitian berikutnya, yaitu:

1. Menghindari pengambilan data pada tahun terjadinya kejadian luar biasa yang dapat mendistorsi hasil penelitian seperti data tahun terjadinya Covid19.

2. Menambahkan variable independent lain yang dapat menjelaskan factor peningkatan PAD seperti Tingkat inflasi daerah, perkembangan PDRB daerah, dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 14*, , 250-262.
- Amstrong, S. J. (2012). Illusion in Regression Analysis. *International Journal Forecasting Vol. 28*, pp. 689-693.
- Anis, J. S. (2018). Kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Bojonegoro, Pemerintah Daerah. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro.
- Bojonegoro, Pemerintah Daerah. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Bojonegoro.
- Dewi , S. M., Kurnia, D., & Haryadi, E. (2022). Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan Vol. 2 No. 2*, 83-94.
- Donaldson, L., & Davis. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory. *Australian Journal of Management*, 49-64.
- Effendi, S. (2021). Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. . *Jurnal Akuntansi Bareleng, 5(2)*, 67-73.
- George, R. T. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Halim, A., & Kusufi. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2021). *Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Janie, D. N. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press.
- Online Pajak. (2023, November 10). *Online Pajak*. Retrieved from Online-Pajak.com: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan>
- Pamungkas, E. G., Nurhasanah, N., & Solehudin. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* 7(4), 10288-10300.
- Sekaran, U. d. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian edisi 6, buku 1.*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2007). Jakarta.
- Wahyuni, M. (2020). *Statistik Deskriptif untuk Penelitian Oleh Data Manual dan SPSS Versi 25*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Wahyuni, R. A., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal* , 98-107.
- Yin, R. K. (2006). *Studi Kasus Desain dan Metode, Edisi Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

